

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda-benda tak hidup lainnya.¹ Lingkungan hidup merupakan suatu sistem, di mana lingkungan hidup akan seimbang bila setiap komponennya stabil. Perubahan drastis beberapa komponen lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik maupun privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara.² Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup tentunya akan mengganggu aspek-aspek kehidupan dari makhluk hidup.

Masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kasus pencemaran yang rentan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia

¹ Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 48.

² Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

sudah menjadi fenomena yang seringkali terjadi sejak tahun 1960, yaitu di wilayah Sumatera dan diikuti kebakaran pertama pada tahun 1980 di wilayah Kalimantan. Kebakaran hutan di wilayah Indonesia hampir rutin terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga setelah Amerika dan Cina yang disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, dan kebakaran hutan.³ Pantauan citra satelit memperlihatkan bahwa 575 titik api terdeteksi di Sumatra dan 1.312 di Kalimantan, serta di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.⁴ Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia khususnya di Riau, Kalimantan, Jambi dan daerah lainnya akan menimbulkan pencemaran udara, yang dampak asapnya bisa melintasi batas negara Indonesia dan masuk ke negara-negara tetangga, utamanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN.

ASEAN atau *Association of South Asian Nations* merupakan organisasi persatuan regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Asosiasi ini bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan dalam perkembangannya juga bekerja sama dalam hal lingkungan. Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) melalui Undang-Undang

³ Green Peace Indonesia, 2014, *Tanggapan Green Peace atas Studi Baru yang Menyatakan Deforestasi Indonesia Tertinggi di Dunia*, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases>, diakses pada 5 September 2017.

⁴ Diakses dari <http://www.dw.com/id/hutan-sumatera-dan-kalimantan-membara/g-18712886> pada tanggal 7 September 2017 pukul 12:32 WIB.

Nomor 38 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum resmi dari berbagai perjanjian kerja sama di tingkat ASEAN.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara serta dampak pencemaran asap yang dihasilkan, negara-negara ASEAN mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan penanganan pencemaran asap di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya kerja sama ASEAN terkait pencemaran asap lintas batas ini adalah reaksi dari negara-negara anggota ASEAN terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997.⁵ Pada tahun 2002 akhirnya negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk merumuskan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* guna mengendalikan pencemaran asap di kawasan Asia Tenggara. Indonesia beserta negara anggota ASEAN lainnya sepakat untuk bahu-membahu mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya tersebut secara bersama-sama melalui penandatanganan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* pada tanggal 10 Juni 2002, yang kemudian *entry into force* pada 25 November 2003.⁶

Perjanjian ini baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2014.

Indonesia merupakan negara terakhir dari negara-negara ASEAN lainnya

⁵ Diakses dari <http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/> pada 6 September 2017 pukul 10:08.

⁶ Diakses dari <http://asean.org/asean-haze-agreement-to-enter-into-force/> pada 7 September 2017 pukul 12:47 WIB.

yang meratifikasi perjanjian ini. Masalah pencemaran asap lintas batas menjadi masalah yang penting karena dampak dari pencemaran asap lintas batas ini tidak hanya dirasakan di satu negara saja, namun berpotensi melintasi batas-batas negara lain yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Dampak dari pencemaran asap ini tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan, serta mengganggu sektor-sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan pariwisata yang akan berimbas pada kerugian.

Pencemaran asap yang sumbernya di Indonesia dirasakan pula dampaknya oleh negara lain, kabut asapnya turut dirasakan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara tersebut sudah menyampaikan protesnya kepada Indonesia karena pencemaran asap tersebut membawa dampak buruk terhadap masing-masing negara terutama memburuknya kualitas lingkungan di negara-negara tersebut, terlebih lagi mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Dalam kasus ini, Singapura menjadi negara yang melayangkan protes paling keras terhadap Indonesia. Akibat pencemaran asap lintas batas ini, Singapura menderita banyak sekali kerugian. Menteri Sumber Daya Air dan Lingkungan Singapura, Masagos Zulkifli, memperkirakan bahwa negaranya mengalami kerugian hingga US\$700 juta atau setara Rp9,2 triliun akibat kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.⁷ Asap tersebut tentunya akan membahayakan kesehatan warga Singapura. Selain itu juga

⁷ Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160316145925-106-117832/singapura-diperkirakan-rugi-rp92-t-akibat-karhutla-indonesia/> pada tanggal 7 September 2017 pukul 13:48 WIB.

menghambat kegiatan ekonomi dan pendidikan karena asap yang begitu tebal menyebabkan masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas dengan normal. Beberapa sekolah dan kantor terpaksa diliburkan karena buruknya kualitas udara di Singapura. Pemerintah Singapura menghimbau warganya untuk membatasi kegiatan di luar ruangan. Dari sektor pariwisata dan transportasi pun banyak penerbangan yang terpaksa dibatalkan karena kabut asap mengganggu dan membahayakan penerbangan. Diperkirakan hampir 1.600 penerbangan batal. Garuda Indonesia melalui juru bicaranya, Benny Butar-Butar menyebutkan potensi kerugian yang dialami mencapai US\$8 juta atau Rp109 miliar.⁸

Malaysia dan Singapura bahkan sampai mengirimkan helikopter yang berisi hujan buatan untuk membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dampak dari pencemaran asap lintas batas ini semakin parah dan merugikan negara-negara tetangga terutama Singapura sehingga Singapura merasa perlu untuk turun tangan secara riil agar kerugian yang terjadi di negaranya tidak semakin berlarut-larut.

Untuk mengantisipasi pencemaran asap lintas batas yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, Parlemen Singapura membuat sebuah regulasi tentang *Bill of Transboundary Haze Pollution* yang isinya memungkinkan pemerintah Singapura untuk menuntut individu atau perusahaan di negara-negara tetangga yang terbukti menjadi penyebab

⁸ Diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap pada tanggal 7 September 2017 pukul 13:53 WIB.

pencemaran udara di Singapura. Dampak buruk pencemaran asap ini telah dirasakan di Singapura bertahun-tahun, tanpa solusi efektif. Jadi setiap perusahaan yang terbukti secara ilegal membakar hutan akan diseret ke pengadilan Singapura dan dengan tujuan menghancurkan reputasi perusahaan ini, sehingga klien, bank, dan asuransi akan enggan melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan ini. Singapura dapat mengenakan denda senilai SGD 100.000 kepada perusahaan lokal atau perusahaan asing yang berkontribusi terhadap pencemaran asap yang membahayakan bagi kesehatan penduduk. Denda maksimal dapat dikenakan senilai SGD 2 juta.⁹ Pengaruh *Bill of Transboundary Haze Pollution* ini merupakan salah satu bentuk protes keras dari Singapura terkait masalah pencemaran asap lintas batas.

Dalam hukum internasional dikenal beberapa prinsip yang menegaskan bahwa negara yang menyebabkan kerugian bagi negara lain patut bertanggung jawab. Prinsip *state responsibility* juga perlu dikaitkan dalam kasus ini karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian bagi Singapura. Pertanggungjawaban pemerintah negara dalam hukum nasional tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hutan termasuk kekayaan alam yang

⁹ Diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/107183-singapura-gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan>, pada 7 September 2017 pukul 13:42 WIB.

dikuasai oleh pemerintah Indonesia sehingga sepatutnya pemerintah Indonesia melakukan pengawasan terpadu terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan karena dari kebakaran hutan inilah timbul pencemaran asap lintas batas.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai peraturan terkait lingkungan di kawasan Asia Tenggara yang sudah dibuat dan disepakati bersama melalui suatu persetujuan diharapkan mengikat negara-negara anggotanya. Indonesia memiliki urgensi dan tanggung jawab yang besar dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Pasca ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, masalah pencemaran asap lintas batas kini tidak menjadi masalah bagi Indonesia semata, tetapi telah menjadi kepentingan bersama negara-negara ASEAN.

Masalah kebakaran hutan dan lahan dalam skala nasional belum sepenuhnya tuntas akan tetapi masalah pencemaran asap yang terjadi di negara Singapura semakin parah. Aturan regional yang mengatur terkait hal ini memang sudah ada dan sudah diratifikasi oleh Indonesia namun penyelesaian hukum mengenai pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kerugian yang dialami Singapura belum jelas. Dalam Pasal 27 *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* memang sudah diatur mengenai *settlement* apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi, namun dalam kasus ini belum diatur bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara atas pencemaran asap lintas batas yang memadai

terutama dalam hal menyebabkan kerugian bagi negara lain. Oleh karena itu penulis akan mengkaji *state responsibility* dari pemerintah Indonesia terhadap kerugian Singapura akibat pencemaran asap lintas batas ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian yang dialami Singapura?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab (*state responsibility*) pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian yang dialami Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi perkembangan Ilmu Hukum pada

umumnya dan perkembangan bidang Hukum Internasional pada khususnya, terutama dalam konteks tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap pencemaran asap lintas batas.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah Indonesia dan Singapura terutama pada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka menegaskan pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah Indonesia serta pengaturan *settlement* antara kedua negara yang semakin mengutamakan perlindungan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini baru pertama kali diteliti. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penelitian ini sudah pernah diteliti maka hasil penelitian yang serupa ini hanya sebagai literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab (*state responsibility*) pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian

yang dialami Singapura. Penelitian lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Akibat Polusi Asap Lintas Batas (*Transboundary Haze Pollution*) dalam Kasus Malaysia dan Singapura.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama Mahasiswa : S Avel Haezer M
- 2) NPM : B111 12 74
- 3) Program Studi : Hukum Internasional
- 4) Fakultas : Hukum – Universitas Hasanuddin
Makassar

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak kabut asap yang terjadi di Riau terhadap negara Malaysia dan Singapura (*transboundary haze*)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura dalam kasus kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau?

d. Hasil Penelitian

Kebakaran hutan yang dialami Indonesia yang menyebabkan kerugian terhadap negara-negara secara finansial dan

kesehatan membuat Malaysia dan Singapura melayangkan protes keras atas ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola wilayah hutannya dari kebakaran. Singapura membuat Undang Undang Polusi Asap Lintas Batas yang disahkan oleh Parlemen Singapura pada 5 Agustus 2014. Berdasarkan regulasi baru tersebut, apabila perusahaan terbukti melakukan pembakaran hutan dan menyebabkan asap tersebar sampai ke Singapura, maka dapat dikenakan denda hingga SGD 2 juta atau Rp18 miliar. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi Pemerintah Singapura untuk menyeret ke pengadilan pemilik perusahaan yang tidak memiliki aset atau kantor perwakilan di Singapura, namun terbukti berkontribusi menyebarkan asap ke negeri Singapura.

Bentuk pertanggungjawaban negara yang paling tepat adalah ganti rugi (*pecuniary reparation*) dengan kewajiban untuk mencegah terulangnya kerusakan. Menurut konsep *objective fault criteria* dari Sharon Williams, objek pelanggaran adalah kewajiban internasional, yaitu kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian di negara lain. Besarnya ganti rugi ditetapkan oleh negara yang dirugikan.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Kepentingan Indonesia dalam Penundaan Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

b. Identitas Penulis

- 1) Nama Mahasiswa : Mutia Rahmatia
- 2) NPM : 1010853017
- 3) Program Studi : Hubungan Internasional
- 4) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas
Andalas Padang

c. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia melakukan penundaan ratifikasi terhadap *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dari tahun 2002-2014?

d. Hasil Penelitian

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan niat ASEAN untuk mengontrol, mencegah, dan menindaklanjuti pencemaran asap lintas batas yang terjadi. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa ratifikasi perjanjian ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dan ASEAN. Tindakan ratifikasi ini akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengendalikan kabut asap yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menunda ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dikarenakan regulasi dalam pasal-pasal *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* memberatkan Indonesia dalam meratifikasinya. Indonesia menunda proses ratifikasi perjanjian ini karena Indonesia berkepentingan

untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Indonesia belum dapat menyelesaikan permasalahan dalam negeri yaitu kurangnya kemampuan ekonomi Indonesia dalam melakukan penanggulangan kabut asap.

Meskipun dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, terdapat klausul yang mengatur mengenai pemberian bantuan dana, namun prosesnya rumit dan belum adanya kejelasan mengenai syarat-syarat pemberian bantuan dana itu. Penundaan ratifikasi memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam pengembangan industri minyak kelapa sawit dan industri kertas, yang mana kedua industri ini merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyebabkan Indonesia melakukan penundaan ratifikasi perjanjian ini demi menjaga kestabilan ekonomi di negaranya.

3. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Ketidakefektifan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam Penanggulangan Pencemaran Asap di Asia Tenggara

b. Identitas Penulis

1) Nama Mahasiswa : Resty Adinda Putri Hutami

- 2) NPM : 105120401111008
3) Program Studi : Hubungan Internasional
4) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas
Brawijaya Malang

c. Rumusan Masalah

Mengapa *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* tidak efektif dalam menanggulangi masalah asap di Asia Tenggara?

d. Hasil Penelitian

Ketidakefektifan sebuah hukum disebabkan oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity*. Bukti ketidakefektifan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah dengan melihat catatan pencemaran asap lintas batas yang terjadi sejak perjanjian ini berlaku yaitu pada tahun 2003 hingga tahun 2013, bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun berlaku, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* tidak menunjukkan perubahan yang berarti terhadap lingkungan. Situasi ini menyebabkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menjadi tidak efektif karena kemampuan penyelesaian masalah yang dimiliki oleh negara ASEAN tidak dapat mengatasi masalah pencemaran asap di Asia Tenggara.

Berdasarkan ketiga contoh skripsi di atas, maka dapat dirunut bahwa meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki tema yang hampir sama

dengan judul penulisan hukum ini, namun ketiga contoh skripsi tersebut berbeda dalam hal fokus permasalahannya. Skripsi pertama difokuskan pada dampak dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kabut asap di Malaysia dan Singapura. Skripsi kedua difokuskan pada alasan Indonesia melakukan penundaan terhadap ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Skripsi ketiga difokuskan pada efektivitas dari ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam menanggulangi pencemaran asap. Adapun penulisan hukum ini memfokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab hukum dari pemerintah Indonesia berkaitan dengan kerugian Singapura. Dari perbedaan yang penulis kemukakan di atas, maka penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari pihak manapun.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Tanggung jawab negara (*state responsibility*)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab negara menurut Pasal 1 *International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) yaitu "every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State".¹⁰ Setiap tindakan atau kelalaian yang

¹⁰ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, *International Law Commission*.

dilarang oleh hukum internasional membawa pertanggungjawaban internasional bagi negara tersebut.

2. Ratifikasi

Yang dimaksud dengan ratifikasi adalah tindakan internasional di mana suatu negara menyatakan kesediannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.¹¹

3. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Yang dimaksud dengan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) adalah sebuah perjanjian lingkungan regional yang ditandatangani pada tahun 2002 oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap di kawasan Asia Tenggara.¹²

4. Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian adalah menderita rugi atau sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan).¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan atau data

¹¹ Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

¹² Diakses dari <http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/> pada 7 September 2017 pukul 18:44WIB.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

sekunder. Penelitian ini tidak hanya dilakukan terhadap perjanjian internasional tapi juga terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari narasumber yang diperoleh melalui wawancara untuk mengkaji mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kerugian yang dialami Singapura.

2. Sumber Data

a. Studi kepustakaan

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

i. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang bersifat mengikat terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- d) *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001
- e) *Stockholm Declaration on The Human Environment* 1972

f) *The Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution* 1979

g) *Rio Declaration on Environment and Development* 1992

h) *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969

ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku mengenai hukum internasional, jurnal, hasil penelitian, media massa, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

b. Narasumber

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber yaitu Bapak Jehezkiel Stephanus George Lantu selaku Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN pada Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh data dan pendapat hukum secara mendalam.

3. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan analisis terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data tersebut berguna untuk menemukan pengaturan tanggung jawab

negara sebagai akibat dari pencemaran asap lintas batas yang diperoleh dari konvensi, buku, internet, dan berbagai pendapat ahli yang akan dianalisis secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/ skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan mengenai tanggung jawab negara (*state responsibility*), tinjauan mengenai *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, dan tinjauan mengenai pertanggungjawaban (*state responsibility*) terkait kerugian Singapura akibat dampak pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran.